

II & BISNIS

Pikiran Rakyat

SENIN (PON) 18 FEBRUARI 2013
7 RABUL AKHIR 1434 H
SILIH MULUD 1946

Meniadakan Hambatan Akses ke Perbankan

BANK Indonesia (BI) meluncurkan program Nasional Strategy: Financial Inclusion (NSFI) sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Selama ini, 32% atau 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh jasa keuangan (*financially excluded*). Program *financial inclusion* itu merupakan kebijakan yang meliputi lima aspek, yakni kebijakan penguatan stabilitas moneter, kebijakan mendorong peran intermediasi perbankan, kebijakan meningkatkan ketahanan perbankan, penguatan kebijakan makro prudensial, serta penguatan fungsi pengawasan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meniadakan hambatan akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan, baik yang bersifat haraga maupun nonharaga.

Program *financial inclusion* akan dimulai dari sektor perbankan karena mayoritas kegiatan jasa keuangan di

Indonesia tergantung pada bank. Melalui penerapan *financial inclusion* akan membuka akses masyarakat miskin kepada upaya peningkatan kegiatan ekonominya, karena adanya penyediaan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, pembayaran dan asuransi, yang akan membawa *unable people* dalam jaringan lembaga keuangan sehingga mereka dapat menikmati layanan keuangan seperti kelompok *bankable people*.

Dengan kata lain, *financial inclusion* dapat diringkaskan menjadi kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan, baik yang bersifat haraga maupun nonharaga terhadap akses



masyarakat dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Sebagian besar UMKM berkembang tanpa dukungan dana bank. Dari Rp 2.830 triliun dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan, sekitar 41% berasal dari 49.500 rekening dengan simpanan di atas Rp 5 miliar dan jika dibedah lebih jauh, rekening itu hanya dimiliki oleh sekitar 15.000 orang kaya. Sekitar 97,4% rekening dengan simpanan Rp 100 juta ke bawah hanya memiliki dana 16,5% dari dana pihak ketiga.

Sekitar 68% dana pihak ketiga berasal dari 0,64% rekening dengan simpanan Rp 500 juta ke atas. LPS tidak menyediakan data lebih terperinci.

Kemungkinan besar, 80% rekening hanya berisi dana kurang dari Rp 10 juta. Inilah kesenjangan riil simpanan di perbankan nasional. Survei menunjukkan, sekitar 80 responden mengaku tidak punya tabungan karena tidak memiliki uang. Sementara 60% calon debitur dinyatakan tidak layak mendapatkan kredit bank. Jika untuk menabung saja mereka tidak punya uang, bagaimana mungkin mereka bisa membeli polis asuransi? Bagaimana bisa mereka memiliki dana pensiun dan asuransi kesehatan?

Bagi Indonesia, isu *financial inclusion* adalah menaikkan pendapatan rakyat lewat pembukaan lapangan kerja, penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, pembangunan berbagai jenis infrastruktur, pendidikan dan latihan, serta belanja negara yang lebih banyak dialokasikan ke perdesaan. (Heri Nugraha Dosen Ikopin, pengamat ekonomi, koperasi, perbankan, dan UMKM)***